



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. RadenSaleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

KotakPos 100

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 522-4 / 60A / KPHL BB -

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYIAPAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN NAGARI, HUTAN TANAMAN RAKYAT DAN KEMITRAAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat disegala bidang pengembangan telah menyebabkan tekanan sosial ekonomi terhadap keberadaan hutan, tekanan yang cenderung berlebihan menyebabkan kerusakan hutan sehingga mengganggu kehidupan manusia secara keseluruhan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hasil hutan, serta keseimbangan dengan pemulihan struktur dan fungsi ekosistem hutan disekitar kawasan hutan wilayah kelola KPH Bukit Barisan, UPTD KPH Bukit Barisan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat secara aktif dan telah mengalokasikan kegiatan dan pembiayaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 kegiatan Penyiapan Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Penyiapan Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa;

5. Peraturan Menteri ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Penyiapan Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Nomor 2.00.04.2.00.04.01179.011.5.2;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Penyiapan Pembinaan Dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Dan Kemitraan Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 pada Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan.

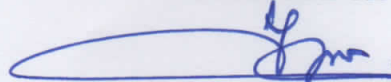
KEDUA: Kerangka ...

- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyiapan Pembinaan Dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Dan Kemitraaan Kehutanan Di Wilayah Kelola KPH Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Pembinaan Dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Dan Kemitraaan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 sebagai pedoman acuan kerja kegiatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Penyiapan Pembinaan Dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Dan Kemitraaan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.00.04.2.00.04.01179.011.5.2
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 14 februari 2019

KEPALA DINAS



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau di Padang.
6. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan di Padang.
8. Kuasa Pengguna Anggaran DPA SKPD UPTD KPHL Bukit Barisan TA. 2019 di Padang.
9. Peringgal.